



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026

**DINAS TENAGA KERJA  
KOTA CIMAH I**

**# bangga  
melayani  
bangsa**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**VISI  
CIMAH I  
KOTA CERDAS**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	8
2.2 Sumber Daya SKPD .....	9
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	11
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan TUPOKSI SKPD.....	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH terpilih .....	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota Lainnya .....	21
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	27
3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	29
<b>BAB IV TUJUAN, SASARAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	34
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,     KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi arahan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada masa periode 2023 - 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Dokumen renstra ini merupakan dokumen turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Periode renstra tahun 2023 - 2026 memiliki kondisi yang berbeda yang belum pernah terjadi pada periode Renstra sebelumnya dimana pada periode ini Kota Cimahi tidak memiliki kepala daerah terpilih. Dengan kondisi ini maka pada proses perencanaan pembangunan tidak ada lagi yang melalui pendekatan politis. Dengan demikian, tidak ada lagi digunakan visi dan misi khusus dari kepala daerah tapi kembali menggunakan visi dan misi yang ada pada dokumen induk yakni rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005 -2025.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Akhir kata, kami berharap agar dokumen rencana strategis ini dapat memberikan manfaat maksimal khususnya bagi pengembangan berkelanjutan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi.

**Cimahi, 11 Juli 2022**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**

**KOTA CIMAHI**



**Drs. YANUAR TAUFIK, M.M.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19640121 199102 1 003**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang merupakan implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah bagian yang sangat penting dari cita-cita besar sebuah daerah. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut maka dibutuhkan sebuah model manajemen yang baik dan berkualitas. Salah satu fungsi manajemen yang paling utama adalah Perencanaan karena dari fungsi tersebutlah fungsi-fungsi lain dilaksanakan. Perencanaan merupakan cetak biru untuk pencapaian tujuan yang memuat pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan, jadwal, tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan terkait dengan pencapaian tujuan tersebut. Dapat dikatakan bahwa sebuah rencana merupakan jembatan yang dibangun untuk menghubungkan antara masa kini dengan masa datang yang diinginkan, karena perencanaan adalah mempersiapkan masa depan. Masa depan memang akan datang dengan sendirinya, tapi tanpa perencanaan masa depan tersebut mungkin bukan masa depan yang kita inginkan.

Kota Cimahi adalah sebuah Kota kecil yang terbentuk dan menjalankan era otonomi daerah sejak tahun 2001. Dengan potensi sumber daya alam yang sangat terbatas maka Kota Cimahi harus berusaha keras menggali sumber daya lainnya yang memiliki daya dukung terhadap keberhasilan pembangunan Kota.

Sebagaimana implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka disusunlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan pada masa kekosongan Kepala Daerah Terpilih sampai terlaksananya Pilkada Serentak tahun 2024 dan ditetapkannya Kepala Daerah Terpilih.

Paralel dengan penyusunan RPD Kota Cimahi 2023-2026, sesuai dengan Immendagri Nomor 70 tahun 2021 tersebut, maka

setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi harus menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman yang diharapkan mampu mengimplementasikan asas akuntabilitas serta peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga optimalisasi serangkaian kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat terwujud.

Renstra yang disusun ini merupakan langkah awal yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sehingga proses pencapaian tujuan dari Visi dan Misi akan selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi sampai tahun 2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4356);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi;

29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 196);
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 157 seri A);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022
33. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yaitu mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab 1 Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum sebagai bahan pijakan penyusunan kebijakan serta maksud dan tujuan dalam penyusunan Renstra.

#### **Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai representasi dari tugas dan kewenangan organisasi yang diamanatkan untuk

mencapai tujuannya yaitu pelayanan kepada masyarakat, sumber daya yang digunakan oleh organisasi yaitu manusia dengan segala kemampuan, inovasi, pemahaman aspek administratif serta alat dan peralatan yang mendukung pelaksanaan kinerja. Kinerja pelayanan yang memberikan deskripsi berbagai syarat dan dokumen yang digunakan dan jumlah pelayanan yang dilakukan selama satu tahun, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD, sebagai bentuk data input untuk perbaikan pelayanan dan peningkatan berkesinambungan.

### **Bab 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

Dimulai dengan identifikasi masalah berdasarkan tupoksi dinas yang merupakan keadaan terkini baik yang merupakan faktor pendorong dan penghambat, tuntutan pelayanan kepada masyarakat maupun kebijakan pemerintah, telaahan visi dan misi KDH terpilih, telaahan Renstra, telaahan RTRW serta kajian lingkungan hidup strategis.

### **Bab 4 Tujuan dan Sasaran**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah.

### **Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 4 tahun mendatang .

### **Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya.

### **Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **Bab 8 Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Daerah/tugas Walikota untuk merumuskan kebijakan Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kota Cimahi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja wewenang Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Pengawasan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hubungan Industrial serta, Jaminan Sosial, pelaksanaan urusan Kesekretariatan terdiri atas Sekretaris dan 2 Sub Bagian. Adapun fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah :

1. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilakukan secara profesional oleh Sumber Daya Aparatur yang ada di dalamnya dan tergambar pada struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi :
  1. Instruktur Ahli Muda Instruktur; dan
  2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :  
Mediator Ahli Muda Hubungan Industrial.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2.2 Sumber Daya SKPD**

Sumber daya aparatur pada Dinas Tenaga Kerja saat ini adalah sebagai berikut :

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a. Jabatan eselon II.b    | : 1 orang         |
| b. Jabatan eselon III.a   | : 1 orang         |
| c. Jabatan eselon III.b   | : 2 orang         |
| d. Jabatan eselon IV.a    | : 3 orang         |
| e. Jabatan Fungsional     | : 5 orang         |
| f. Unsur Pelaksana        | : 14 orang        |
| <b>Jumlah keseluruhan</b> | <b>: 25 orang</b> |

Gambaran Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilihat dari aspek golongan, pendidikan dan masa kerja adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural

<b>No</b>	<b>Jabatan/Bagian</b>	<b>Pangkat/ Golongan Ruang</b>	<b>Jenjang pendidikan/jurusan</b>	<b>Jumlah Personil</b>
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	S2/Magister Manajemen Sumber Daya Manusia	1
2.	Sekretaris	Pembina Tingkat I, IV/b	S2/Magister Manajemen Sumber Daya Manusia	1
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	Penata, III/c	S2/ Manajemen Pembangunan Daerah	1
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
3.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembina, IV/a	S1/ Manajemen Pembangunan Daerah	1
	Instruktur Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	S1/Manajemen	1
	Kepala Seksi Penempatan dan Transmigrasi	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Hukum	1
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pembina, IV/a	S2/ Administrasi Publik	1
	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Mediator Hubungan Industrial;	Penata Tingkat I, III/d	S.1/ Ilmu Hukum	1
	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Mediator Hubungan Industrial.	Penata Tingkat I, III/d	S.1/ Ilmu Administrasi Negara	1
<b>J u m l a h</b>				<b>10</b>

2. Umum

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
A.	<b>Masa Kerja</b>		Dihitung berdasarkan Masa kerja seluruhnya.
	0-5 tahun	1 Orang	
	6-10 tahun	1 Orang	
	11-15 tahun	16 Orang	
	16-20 tahun	1 Orang	
	21-25 tahun	0	
	26-30 tahun	3 Orang	
	30 tahun ke atas	3 Orang	
B.	<b>Golongan</b>	- Orang	
	I	6 Orang	
	II	14 Orang	
	III	4 Orang	
	IV		
C.	<b>Pendidikan</b>		
	SMP	- Orang	
	SMA	5 Orang	
	DIII	2 Orang	
	S.1	12 Orang	
	S.2	4 Orang	

3. Asset

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	MOBIL	2	
2	MOTOR	1	
3	MEJA KERJA	40	
4	LEMARI BESI	18	
5	KOMPUTER	39	
6	FILLING KABINET	6	
7	LAPTOP	12	

**2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi terdiri dari 2 (dua) urusan dan kewenangan, yaitu Urusan Wajib Ketenagakerjaan, Urusan Pilihan Transmigrasi yang masing-masing bertanggungjawab pada urusan yang menjadi kewenangannya.

Indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi. Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase perusahaan yang menerapkan UMSK	Persen	N/A	13,21	13,21	13,5	16	*)	*)
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	N/A	70	70	70	79,16	50	42,86
3	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	62.686	51.849	56.286	52.000	57.208	51.203	60.068
4	Persentase Pengangguran di Kota Cimahi	Persen	7	8,11	8,11	8,11	8,11	13,5	13,30
5	Angka Kesempatan Kerja	Orang	272.017	278.574	273.955	285.108	272.553	291.607	254.699
6	Persentase kenaikan UMK	Persen	8,25	8,71	8,71	8,03	8,03	*)	*)
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,68)	B	(65,86)	B	(66,52)	BB	(70,25)
8	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	85	85,38	85	86,23	100	100

Adapun Program Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi yang dicapai dalam masa tahun 2021-2022 sebagai wujud kinerja pelayanan SOPD adalah sebagai berikut :

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi**

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung - Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021			Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1.	Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Kesesuaian Program di RTKD dengan Program di Renstra</b>		0	0	0	90 %	-	-	90 %	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Jumlah Dokumen RTK		0	0	0	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen RTKD Kota Cimahi		0	0	0	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan</b>		5%	14,08%	281,60 %	5 %	-	-	5 %	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Persentase pencari kerja yang memiliki standar kompetensi		10 %	4,28%	42,80%	15 %	-	-	15 %	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	- Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan Sertifikasi - Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan; - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang mengikuti Bimbingan teknis;		- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	0 Orang - 188 Orang - 0 Orang	0 % - 188 Orang - 0 %	- 200 Orang	-	-	- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	- Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan; - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang mengikuti Bimtek; - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang disertifikasi		- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	0 Orang - 188 Orang - 0 Orang	0 % - 188 Orang - 0 %	- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	-	-	- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	- Jumlah Instruktur yang Bersertifikat		- 10 Orang	0	0 %	- 10 Orang	-	-	- 10 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di bina</b>		31 LPK	32 LPK	103,22 %	31 LPK	-	-	31 LPK	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	- Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di bina		31 LPK	32 LPK	103,22 %	31 LPK	-	-	31 LPK	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026

			<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-	<b>1 Dokumen</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		1 Dokumen	1 Dokumen	<b>100%</b>	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan</b>		<b>50 %</b>	77,68%	155,36 %	<b>50 %</b>	-	-	<b>50 %</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>Pelayanan Antar Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang disalurkan dan ditempatkan</b>		<b>1.000 Orang</b>	<b>1037</b>	<b>103,7%</b>	<b>1.000 Orang</b>	-	-	<b>1.000 Orang</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	- Jumlah Fungsional Pengantar Kerja		1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang	-	-	2 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pelayanan Antar Kerja	- Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang disalurkan dan ditempatkan		1.000 Orang	<b>1037</b>	<b>103,7%</b>	1.000 Orang	-	-	1.000 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Pelayanan		1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	-	-	1 Unit	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Perluasan Kesempatan Kerja	- Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Bimtek		150 Orang	0 Orang	0%	150 Orang	-	-	150 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>- Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Operasional</b> <b>- Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dikelola</b> <b>- Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja</b>		<b>- 12 Bulan</b> <b>- 1 Aplikasi</b> <b>- 5 Media</b>	<b>- 12 Bulan</b> <b>- 1 Aplikasi</b> <b>- 5 Media</b>	<b>- 100%</b> <b>- 100%</b> <b>- 100%</b>	<b>- 12 Bulan</b> <b>- 1 Aplikasi</b> <b>- 5 Media</b>	-	-	<b>- 12 Bulan</b> <b>- 1 Aplikasi</b> <b>- 5 Media</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	- Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Operasional		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	- Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dikelola - Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja		- 1 Aplikasi - 5 Media	<b>- 1 Aplikasi</b> <b>- 5 Media</b>	<b>- 100%</b> <b>- 100%</b>	- 1 Aplikasi - 5 Media	-	-	- 1 Aplikasi - 5 Media	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Job Fair/Bursa Kerja	- Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Job Fair - Jumlah Pencari Kerja yang tersalurkan melalui Job Fair - Jumlah Perusahaan yang mengikuti Job Fair		-5.000 Orang -150 Orang -30 Perusahaan	-0 Orang -0 Orang -0 Perusahaan	- 0% - 0% - 0%	-5.000 Orang -150 Orang -30 Perusahaan	-	-	-5.000 Orang -150 Orang -30 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)</b>							-	-		Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi		0 Kali	0 Kali	- 0%	3 Kali	-	-	3 Kali	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>- Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan TKA yang mendapatkan Sosialisasi</b>		<b>- 35 Perusahaan</b>	<b>- 35 Perusahaan</b>	100%	<b>- 35 Perusahaan</b>	-	-	<b>- 35 Perusahaan</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026

			- Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan TKA yang mendapatkan Sosialisasi	- 35 Perusahaan	- 35 Perusahaan	100%	- 35 Perusahaan	-	-	- 35 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan</b>	<b>50 %</b>	<b>95,65 %</b>	<b>191,30%</b>	<b>50 %</b>	-	-	<b>50 %</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>- Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama</b>	<b>- 48 Dokumen</b>	<b>41 Dokumen</b>	<b>91,11%</b>	<b>- 44 Dokumen</b>	-	-	<b>- 44 Dokumen</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	- Jumlah Peraturan Perusahaan	- 40 Dokumen	37 Dokumen	<b>92,5%</b>	- 40 Dokumen	-	-	- 40 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	- Jumlah Perjanjian Kerja Bersama	- 8 Dokumen	8 Dokumen	50 Dokumen	- 4 Dokumen	-	-	- 4 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	- Jumlah Perusahaan yang ikut serta dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Jumlah Tenaga Kerja yang ikut serta dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan	-289 Perusahaan -52.000 -8 Kali	-289 Perusahaan -65.969 Orang -8 Kali	-103,46% -126,86% -100%	-289 Perusahaan -52.000 -8 Kali	-	-	-289 Perusahaan -52.000 -8 Kali	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>- Jumlah Kasus Perselisihan yang difasilitasi</b>	<b>- 40 Kasus</b>	<b>45 Kasus</b>	<b>112,5%</b>	<b>- 25 Kasus</b>	-	-	<b>- 25 Kasus</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Fasilitas Deteksi Dini (kondusifitas ketenagakerjaan) - Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial - Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimtek Struktur Skala Upah	-4 Kegiatan -1 Kali -50 Perusahaan	-4 Kegiatan -1 Kali -50 Perusahaan	-100% -100% -100%	-4 Kegiatan -1 Kali -5 Perusahaan	-	-	-4 Kegiatan -1 Kali -5 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Kasus Perselisihan yang difasilitasi	- 25 Kasus	<b>45 Kasus</b>	<b>112,5%</b>	- 25 Kasus	-	-	- 25 Kasus	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	- Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan	- 6 Dokumen	- 6 Dokumen	100%	- 6 Dokumen	-	-	- 6 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Fasilitas LKS Tripartit - Jumlah Fasilitas Serikat Pekerja	- 8 Kali - 6 Kali	- 8 Kali - 6 Kali	100% 100%	- 8 Kali - 6 Kali	-	-	- 8 Kali - 6 Kali	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026

		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun</b>		0	0	0%	0	-	-	0	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan		4 Kali	0 Kali	0%	4 Kali	-	-	4 Kali	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		<b>PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum - Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi		- BB - 100 % - 90%	- BB - 100 % - 90%	- 100 % - 100 % - 100 %	- BB - 100 % - 90%	-	-	- BB - 100 % - 90%	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		<b>KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Kendaraan yang di asuransikan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	-	-	<b>12 Bulan</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Kendaraan yang di asuransikan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang dibina		40 Orang	40 Orang	100 %	40 Orang	-	-	40 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang dibina		40 Orang	40 Orang	100 %	40 Orang	-	-	40 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		<b>KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>4 Dokumen</b>	-	-	<b>4 Dokumen</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan		13 Dokumen	13 Dokumen	100 %	13 Dokumen	-	-	13 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Fasilitasi gaji dan tunjangan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		<b>KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>(1) Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	-	-	<b>12 Bulan</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan aturan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi

*Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026*

			SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pengadaan ATK		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(1) Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	100 %	<b>12 Bulan</b>	-	-	<b>12 Bulan</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara		3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	-	-	3 Unit	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(1) Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b> <b>(2) Jumlah Set Pengadaan Mebeulair</b>		<b>(1) 1 Unit</b>	<b>(1) 1 Unit</b>	100 %	<b>(1) 1 Unit</b>	-	-	<b>(1) 1 Unit</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
						<b>(2) 1 Set</b>	<b>(2) 1 Set</b>	100 %	<b>(2) 1 Set</b>	-	-	<b>(2) 1 Set</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel	Jumlah Set Pengadaan Mebeulair		1 Set	1 Set	100 %	1 Set	-	-	1 Set	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	-	-	1 Unit	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			<b>KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	100 %	<b>12 Bulan</b>	-	-	<b>12 Bulan</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Bulan Jasa Listrik		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Bulan Jasa Air		0	0	0 %	0	-	-	0	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Kantor		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	-	-	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi

*Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026*

			<b>KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun</b>		<b>16 Dokumen</b>	<b>16 Dokumen</b>	100 %	<b>16 Dokumen</b>	-	-	<b>16 Dokumen</b>	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah dokumen monev kinerja bulanan		12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	-	-	12 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah dokumen monev kinerja tahunan		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah dokumen monev kinerja triwulan		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah SOP yang disusun		0 SOP	0 SOP	0 %	0 SOP	-	-	0 SOP	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah SOP yang sertifikasi ISO		0 SOP	0 SOP	0 %	0 SOP	-	-	0 SOP	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Nilai SKM Perangkat Daerah		82 Poin	86,52 Poin	105,51 %	82 Poin	-	-	82 Poin	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Dokumen Renja		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Dokumen Renja Perubahan		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian di Kota Cimahi, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi (RPJPD) dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2023-2026. Beberapa permasalahan di Kota Cimahi yang perlu ditangani pada periode tahun 2023-2026 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:

##### **A. Permasalahan terkait Sekretariat**

- 1) Kurang sesuainya kompetensi sumber daya manusia yang tersedia dengan bidang kerjanya.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, di antaranya komputer yang harus dilakukan peremajaan, juga terbatasnya jumlah kendaraan operasional.

##### **B. Permasalahan terkait bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah:**

- 1) Masih tingginya pengangguran di Kota Cimahi
- 2) Kompetensi tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja

- 3) Penyerapan angkatan kerja yang ada sangat rendah dikarenakan terjadinya pandemi Covid 19 sehingga jumlah pengangguran terus bertambah.
- 4) Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal.
- 5) Rendahnya minat penduduk Kota Cimahi untuk bertransmigrasi dan bekerja di luar daerah .

**C. Permasalahan terkait bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah:**

1. Masih rendahnya pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.
2. Belum optimalnya layanan perlindungan tenaga kerja di daerah terutama jaminan social ketenagakerjaan.
3. Belum optimalnya Lembaga Bipartit untuk menekan Perselisihan Hubungan Industrial di masing – masing perusahaan
4. Masih rendahnya perusahaan/pelaku usaha untuk melaporkan kondisi tenaga kerja
5. Tidak adanya fungsi pengawasan norma kerja di tenaga kerja Kabupaten/Kota menjadikan berkurangnya kewenangan pembinaan hukum terhadap perusahaan.

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi memiliki peran penting dalam penurunan angka pengangguran, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah Terpilih yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dari hasil telaahan visi dan misi Walikota terpilih maka dari misi yang diajukan untuk melaksanakan visi tersebut yang sesuai dan sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi 2023-2026 adalah :

MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Lainnya**

#### **A. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan**

Visi Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 adalah melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu ***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Ketenagakerjaan adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
5. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
6. Sinergi pemerintah dalam kerangka negara kesatuan.

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut yaitu:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Ketenagakerjaan, maka tujuan pembangunan Kementerian Ketenagakerjaan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
2. Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
3. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
4. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
5. Mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
6. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, dimana kontribusi ini merupakan kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, yang dihitung berdasarkan besar upah yang diterima penduduk bekerja pada tahun t. Indikator kinerja sasaran strategis/utama ini didukung sejumlah indikator kinerja program sebagai berikut:
  - Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan.
  - Jumlah tenaga kerja berkeahlian menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing.
  - Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya.
  - Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja.
  - Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3.
  - Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya.
  - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial.
  - Indeks perkembangan kinerja program jaminan sosial ketenagakerjaan.
  - Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing.
  - Persentase usulan kebijakan ketenagakerjaan tahun sebelumnya yang diimplementasikan.
  
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan

dan Indeks SPBE. Ketiga indikator ini didukung oleh sub indikator kinerja program sebagai berikut:

- Indeks dan Nilai Evaluasi PMPRB.
- Persentase temuan yang ditindaklanjuti.
- Nilai evaluasi SAKIP.
- Nilai Kinerja mitra kerja pengawasan internal.
- Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah (termasuk *whistle blowing system*).
- Indeks kepuasan layanan data dan informasi ketenagakerjaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Tenaga kerja Kota Cimahi mendukung pencapaian sasaran kesatu yaitu terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Lebih lanjut, dalam menghadapi pasar kerja yang fleksibel, diperlukan tenaga kerja yang adaptif yang mampu menunjang perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran Pemerintah Daerah serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Ketenagakerjaan tercantum pada tabel berikut:

**Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.	<p>Pencari kerja masih banyak yang tidak mau menjalani pelatihan tetapi langsung ingin menjadi tenaga kerja, padahal mereka belum mempunyai <i>skill</i> dan belum kompeten pada bidangnya</p> <p>Masih banyak pencari kerja yang kualifikasinya belum sesuai dengan Perusahaan dengan <i>stakeholder</i> lainnya</p> <p>Belum mewujudkan sarana hubungan industrial secara menyeluruh khususnya berbasis IT</p>	<p>Pencari kerja masih banyak yang kurang tekun/rajin</p> <p>Standar kualifikasi dari perusahaan terlalu tinggi</p> <p>Rendahnya kesadaran dalam mewujudkan sarana hubungan industrial secara menyeluruh khususnya berbasis IT</p>	<p>Mensosialisasikan pentingnya pelatihan diantaranya pelatihan pemagangan</p> <p>Sudah ada pelatihan dan sosialisasi untuk pencari kerja</p> <p>Upaya Disnaker untuk mewujudkan sarana hubungan industrial secara menyeluruh khususnya berbasis IT</p>

## **B. Telaahan Renstra SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Lainnya**

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 termuat visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018– 2023. Visi Provinsi Jawa Barat adalah "**Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi**". (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif).

Yang dijabarkan ke dalam **lima misi pembangunan** dan **sembilan program unggulan**, yaitu:

**Misi pertama**, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;

**Misi kedua**, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;

**Misi ketiga**, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;

**Misi keempat**, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

**Misi kelima**, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

**program unggulan provinsi jawa barat 2018-2023 sebagai berikut:**

**Pertama**, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;

**Kedua**, desentralisasi pelayanan kesehatan;  
**Ketiga**, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;  
**Keempat**, mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata;  
**Kelima**, mewujudkan pesantren juara;  
**Keenam**, meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah;  
**Ketujuh**, gerakan membangun desa;  
**Kedelapan**, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta  
**Kesembilan**, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Dari misi tersebut diatas dapat dilihat bahwa yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ada di **Misi keempat**:

meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara;

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kota Cimahi merupakan Kota yang berada di Bandung Metropolitan Area. Sebagai Daerah otonom yang sudah berusia 21 tahun, Cimahi memiliki daya tarik tersendiri yang mampu mendatangkan para investor untuk berinvestasi di Kota Cimahi. Selain itu juga banyaknya industri di Kota Cimahi merupakan magnet bagi para pencari kerja dari dalam Kota, luar Kota Cimahi maupun diluar Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini tentunya membawa dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari banyaknya industri atau pabrik di Kota Cimahi adalah faktor lingkungan. Saat ini di beberapa Kelurahan di Kota Cimahi bisa dikategorikan sebagai daerah konsentrasi urban. Pertumbuhan penduduk di daerah tersebut sangat tinggi, bahkan salah satu

Kelurahan di Kota Cimahi yaitu kelurahan Cigugur Tengah pernah “dinobatkan” sebagai daerah terpadat di dunia. Sebuah “prestasi” yang luar biasa dan tentunya membutuhkan penanganan yang terpadu, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada lingkungan hidup namun tetap memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah perencanaan program kegiatan yang dikemas dalam suatu Rencana Strategis yang bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam kurun waktu satu periode kepemimpinan Walikota.

Berbagai peraturan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat sehingga akan terwujud sebuah kelestarian lingkungan hidup yang menjadi salah satu aspek dalam pembangunan daerah.

### **3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Kota Cimahi yang merupakan salah satu Kota Jasa dan memiliki posisi strategis karena keberadaannya yang menjadi penghubung di antara 2 Kota Metropolitan yaitu Kota Bandung sebagai Ibu Kota provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara menjadi sebuah potensi yang jika dianalisis dengan menggunakan prinsip SWOT akan mampu mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi Pemerintah Kota sehingga diperoleh sebuah gambaran yang spesifik mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang dihadapi oleh Kota Cimahi dalam melakukan kegiatan Pembangunan Daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sektor industri menjadi potensi yang menjadi primadona bagi masyarakat Kota Cimahi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk pendatang yang bekerja pada sektor industri. Kondisi ini tentunya mengakibatkan berbagai macam dampak, baik yang sifatnya positif dalam arti menguntungkan bagi penduduk itu sendiri maupun bagi Kota Cimahi secara umum, ataupun berdampak buruk atau negatif yang bisa menimbulkan eksese yang tidak diharapkan.

Hal seperti dikemukakan diatas merupakan gambaran dari tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai OPD yang memiliki Tupoksi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan ketenagakerjaan. Beberapa tantangan yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut :

1. Angka pengangguran yang relatif masih tinggi dan terbatasnya kesempatan kerja;
2. Rendahnya pendidikan calon peserta pelatihan (pencari kerja) dan masih rendahnya kualitas dan produktivitas, pendidikan tenaga kerja;
3. Peminat Transmigrasi/Calon Transmigran reguler yang mendaftar sangat terbatas akibat kurangnya informasi dan pemahaman tentang transmigrasi;
4. Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan kesejahteraan kepada pekerja masih terbatas;
5. Peran serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan masih belum optimal;
6. Masih rendahnya pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban serta prosedur penyelesaian masalah dari sebagian pekerja masih rendah;
7. Belum harmonisnya Hubungan Industrial antara pekerja dengan pengusaha yang dapat dilihat dari gejolak mogok kerja;
8. Relatif rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui program Jamsostek;
9. Relatif masih rendahnya kesejahteraan pekerja / buruh terlihat UMK belum memenuhi standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak);
10. Relatif kurangnya peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan;

### **3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan

pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Selanjutnya secara rinci identifikasi isu-isu strategis menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program pembangunan Kota Cimahi tahun 2023-2026 kami tuangkan dalam analisis SWOT sebagai berikut :

#### **A. Analisis Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal**

Analisis Lingkungan Strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah berdasarkan fakta dan data untuk menganalisis keadaan atau kondisi yang ada dan terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah dalam rangka menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses pengidentifikasian analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam Rencana Strategis SKPD 5 (lima) tahun mendatang dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.

#### **B. Analisis Lingkungan Internal**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal maka semua faktor kekuatan dan kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Pemerintah Kota untuk mengendalikan dan mempengaruhinya.

##### **a. Strengths (Kekuatan)**

- 1) Kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Adanya kebijakan dan program prioritas Walikota/Wakil Walikota periode 2023-2026 di sektor ketenagakerjaan.

- 3) Adanya mekanisme kerja/SOP layanan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang terstandarisasi.
- 4) Tersedianya sumber daya manusia yang melaksanakan beberapa fungsi ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan dan transmigrasi.

**b. Weakness (Kelemahan)**

- 1) Terbatasnya SDM, Instruktur Pelatihan, dan Pengantar Kerja;
- 2) Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- 3) Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang kerja baik di dinas;
- 4) Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi
- 5) Pelayanan publik belum sesuai yang diharapkan.

**C. Analisis Lingkungan Eksternal**

Faktor lingkungan eksternal menggambarkan faktor peluang dan ancaman. Peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan kondisi positif yang berada diluar kendali pemerintah daerah yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, sedangkan faktor ancaman adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan.

**a. Opportunities (Peluang)**

- 1) Letak Kota Cimahi yang strategis sebagai penyangga Ibukota Provinsi.
- 2) Besarnya jumlah angkatan kerja di Kota Cimahi.
- 3) Banyaknya jumlah perusahaan/industri (kecil, menengah, besar) di Kota Cimahi.
- 4) Pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi dalam beberapa tahun cenderung meningkat;

- 5) Pendapatan per Kapita (Rp) Penduduk Kota Cimahi, dalam beberapa tahun mengalami peningkatan ;
- 6) Adanya Bursa Kerja Khusus (BKK) baik dari Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- 7) Angka Pengangguran mulai menurun;
- 8) Besarnya jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi dan siap memasuki pasar kerja;

**b. Threats (Ancaman)**

- 1) Pandemi Covid 19
- 2) Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi;
- 3) Penduduk miskin cenderung meningkat;
- 4) Kurangnya dukungan Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja;
- 5) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi;
- 6) Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi
- 7) Banyaknya penduduk pendatang;
- 8) Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan/ industri

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**1. Strategi S-O**

- 1) Pembinaan kepada Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja
- 2) Pelatihan SDM (PNS) di bidang ketenagakerjaan
- 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pencari kerja

**2. Strategi W-O**

- 1) Pembinaan kepada Bursa Kerja Khusus (BKK) baik dari Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- 2) Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana
- 4) Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat

**3. Strategi S-T**

- 1) Menurunkan jumlah fakir miskin di bawah angka Propinsi Jawa Barat
- 2) Menurunkan jumlah pengangguran terbuka
- 3) Meningkatkan keterampilan pencari kerja
- 4) Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal
- 5) Peningkatan keselamatan pencari kerja.
- 6) Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis
- 7) Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
- 8) Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja
- 9) Pembinaan organisasi pekerja

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan cerminan dari kondisi yang diinginkan. Tujuan merupakan penjabaran Visi Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dalam menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra Perangkat Daerah ini berakhir.

Sedangkan sasaran adalah gambaran hal yang ingin diwujudkan guna mencapai tujuan telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi untuk mendukung misi Walikota Cimahi adalah :

#### **Misi**

MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

#### **Tujuan 1 :**

Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

#### **Sasaran :**

I. Meningkatnya kesempatan kerja

#### **Program :**

1. Program Penempatan Tenaga Kerja

#### **Kegiatan :**

- 1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
  - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
  - Pelayanan antar Kerja
  - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- Perluasan Kesempatan Kerja
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
  - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
  - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  - Job Fair /Bursa Kerja
- 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- 4) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja Kegiatan
  - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
    - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
    - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- 3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kegiatan
  - 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyuluhan Transmigrasi

## II. Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

### **Program :**

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

**Kegiatan :**

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
  - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
  - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

III. Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial

**Program :**

Program Hubungan Industrial

**Kegiatan :**

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
  - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
  - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
  - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -			
				(1)	(2)	(3)	(4)
	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	78 %	79 %	80 %	80 %
		Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90	90	90	90
		Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90	90	90	90

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel berikut:

#### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI</b>	<b>MEWUJUDKAN CIMAHU BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA</b>		
<b>MISI 3</b>	Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan	- Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan  - Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak	Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja  Peningkatan jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi	- Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja - Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi  - Perluasan informasi kerja  - Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja	- Memberikan pelatihan dan sertifikasi  - Menyediakan pusat informasi ketenagakerjaan  - Membuka kesempatan pemagangan dan penempatan tenaga kerja
		Peningkatan kerjasama transmigrasi	Menempatkan calon transmigran

BAB VI

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI  
PERIODE 2023 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13,07 Persen	12,61 Persen		12,4 Persen		12,2 Persen		11,9 Persen	
	Meningkatnya kesempatan kerja		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	77,68 Persen	78 Persen		79 Persen		80 Persen		80 Persen	
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000 orang	809.533.800	1000 orang	766.119.043	1000 orang	721.261.666	1000 orang	732.294.468
		<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,52 Nilai	86 Nilai	252.159.300	86 Nilai	282.159.300	86 Nilai	252.159.300	86 Nilai	252.159.300
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	n.a	-	0	1 Orang	30.000.000	-	0	-	0
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1037 Orang	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	n.a	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	n.a	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	n.a	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media	5 Media	387.492.200	5 Media	318.754.400	5 Media	318.754.400	5 Media	318.754.400

*Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026*

		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	137.877.000						
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Karir Hub)	1335 Orang	1.700 Orang	180.877.400						
		<i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	0 Orang	50 Orang	68.737.800	-	0	-	0	-	0
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitasi	n.a	40 Orang	144.389.600	40 Orang	139.712.643	40 Orang	124.855.266	40 Orang	135.888.068
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	n.a	15 Orang	144.389.600	15 Orang	139.712.643	15 Orang	124.855.266	15 Orang	135.888.068
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	34 Orang	40 Orang	25.492.700						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	34 Dokumen	40 Dokumen	25.492.700						
	<b>Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja</b>		<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi</b>	<b>4,28% Persen</b>	<b>90 Persen</b>		<b>90 Persen</b>		<b>90 Persen</b>		<b>90 Persen</b>	
		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	14,08 persen	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.168.000.000	15 persen	1.172.865.542
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	3 Pelatihan	4 Pelatihan	1.891.204.000	4 Pelatihan	1.891.204.000	3 Pelatihan	1.100.000.000	3 Pelatihan	1.104.865.542
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	188 Orang	300 Orang	1.891.204.000	300 Orang	1.891.204.000	200 Orang	1.100.000.000	200 Orang	1.104.865.542
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Kali	1 Kali	23.000.000						
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	32 Lembaga	33 Lembaga	23.000.000						
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	n.a	1 Kali	15.000.000						

*Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026*

		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	n.a	50 Perusahaan	15.000.000						
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	n.a	1 Kali	30.000.000						
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	n.a	1 Dokumen	30.000.000						
	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial</b>		<b>Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan</b>	<b>95,65 Persen</b>	<b>90 Persen</b>		<b>90 Persen</b>		<b>90 Persen</b>		<b>90 Persen</b>	
		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 persen	90 persen	54.000.000	90 persen	54.000.000	90 persen	35.000.000	90 persen	60.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	60.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	n.a	20 Perusahaan	54.000.000	20 Perusahaan	54.000.000	15 Perusahaan	35.000.000	25 Perusahaan	60.000.000
		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	35 persen	1.397.262.200	37 persen	1.417.262.200	39 persen	1.264.264.200	41 persen	1.264.264.200
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	41 Dokumen	42 Dokumen	433.023.000	43 Dokumen	433.023.000	44 Dokumen	400.025.000	45 Dokumen	400.025.000
		Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online	37 Perusahaan	38 Perusahaan	46.499.000	38 Perusahaan	46.499.000	38 Perusahaan	30.000.000	38 Perusahaan	30.000.000
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	4 Perusahaan	46.499.000	4 Perusahaan	46.499.000	4 Perusahaan	30.000.000	4 Perusahaan	30.000.000

*Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026*

		Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	46 Perkara	45 Perkara	964.239.200	42 Perkara	984.239.200	38 Perkara	864.239.200	35 Perkara	864.239.200
		Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	2 Perkara	517.180.100	2 Perkara	517.180.100	2 Perkara	417.180.100	2 Perkara	417.180.100
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	44 Perkara	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100
		penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dan non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1. 1 Asosiasi 2. 6 Serikat Pekerja	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000
		pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/ kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	n.a	-	0	64.000	20.000.000	-	0	-	0
<b>Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>			<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>13,07 Persen</b>	<b>12,61 Persen</b>		<b>12,4 Persen</b>		<b>12,2 Persen</b>		<b>11,9 Persen</b>	
	<b>Meningkatnya kesempatan kerja</b>		<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan</b>	<b>77,68 Persen</b>	<b>78 Persen</b>		<b>79 Persen</b>		<b>80 Persen</b>		<b>80 Persen</b>	
		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	prosentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	0 persen	100 persen	30.000.000	100 persen	21.144.178	0 persen	0	0 persen	0
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	0 Kali	4 Kali	30.000.000	4 Kali	21.144.178	0 Kali	0	0 Kali	0

*Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026*

		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n.a	4 Laporan	30.000.000	-	0	-	0	-	0
		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	n.a	-	0	25 Orang	21.144.178	-	0	-	0
		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	n.a	-	0	-	0	-	0	-	0
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan	n.a	-	0	-	0	-	0	-	0
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan</b>			<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>n.a Indeks</b>	<b>60 Indeks</b>		<b>60 Indeks</b>		<b>60 Indeks</b>		<b>60 Indeks</b>	
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	- Indeks Profesionalitas ASN - Nilai IKM Perangkat daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- n.a - 86 nilai - BB nilai	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	95 Persen	120.682.200						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.853.800						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.043.700						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.462.000						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.394.900						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.404.000						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	78.523.800						

*Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026*

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.225.565.309	100 Persen	5.328.980.066	100 Persen	5.487.333.911	100 Persen	5.542.055.829
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n.a	27 Orang/Bulan	5.170.737.809	27 Orang/Bulan	5.274.152.566	27 Orang/Bulan	5.432.506.411	27 Orang/Bulan	5.487.228.329
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.628.400						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	17 Laporan	49.199.100						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	23.210.000						
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	23.210.000						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	70.199.700						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	45 Orang	47 Orang	70.199.700						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	282.862.822						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	30.062.800						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.603.200						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	17.646.822						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000						
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000						

*Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026*

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	171.550.000						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	282.905.000						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	282.905.000						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	103.188.000						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.600.000						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	84.588.000						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	305.336.678						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	219.799.000						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	85.537.678						

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai bentuk komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi telah menetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan Dinas Tenaga Kerja Cimahi selama empat tahun mendatang dalam penyelenggaraan bidang urusan Ketenagakerjaan dan transmigrasi, maka manfaat yang akan dirasakan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi;
2. Meningkatnya kesejahteraan buruh.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Terkait dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, untuk mendukung pencapaian tersebut ditetapkan tujuan yang juga tertera pada Indikator Kinerja Utama yang melewati tahap penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 Pemerintah Kota Cimahi yaitu :

1. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan
2. Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2018**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Capaian	Rp. (Realisasi)	
	<b>Tenaga Kerja</b>				<b>3.158.846.625,00</b>	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kenaikan UMK	8,71%	8,03%	1.200.343.500,00	DISNAKER
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	117.694.750,00	DISNAKER
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	1.160.422.500,00	DISNAKER
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	680.385.875,00	DISNAKER

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2019-2020**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	<b>Tenaga Kerja</b>				<b>2.059.100.375,00</b>		<b>1.482.659.650,00</b>	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Buruh	Persentase kenaikan UMK	8,71%	8,03%	762.447.900,00	8,51%	607.824.500	DISNAKER
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	272.553	1.296.652.475,00	300.209	874.835.150	DISNAKER

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2021-2022**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus yang diselesaikan	Persen		50	1.709.180.108	50	1.477.347.000	50	3.186.527.108	Dinas Tenaga Kerja	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	Persen		10	1.442.773.600	15	1.219.556.600	15	2.662.330.200	Dinas Tenaga Kerja	
		2 Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Persen		5		5		5			
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen		50	724.278.400	50	746.745.181	50	1.471.023.581	Dinas Tenaga Kerja	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase kesesuaian program di RTKD dengan program di Renstra	Persen			-	90%	93.538.000	90%	93.538.000	Dinas Tenaga Kerja	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB	5.615.024.573	BB	6.068.037.124	BB	11.230.049.146	Dinas Tenaga Kerja	

*Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2023 - 2026*

---

					2 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		
					3 Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		85		90		90		

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023-2026 Sangat menentukan kemana arah kebijakan organisasi akan berjalan dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan, juga untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari sebuah perencanaan.

Penyusunan renstra yang baik merupakan dukungan perangkat daerah terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2017 – 2022, mengingat Dinas Tenaga Kerja merupakan perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap program unggulan Walikota Cimahi yaitu penyediaan 1000 lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja masih banyak kekurangannya yang disebabkan oleh keterbatasan kami dalam mengeksplorasi berbagai hal yang berkaitan dengan substansi rencana strategis yang merupakan bagian inti dari manajemen strategis dinas kami.

Oleh karena itu kami memerlukan koreksi, saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk bisa memperbaiki Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026.

Sehingga dapat memberikan manfaat khususnya untuk Kota Cimahi dan umumnya kepada berbagai pihak yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan Renstra yang akan kami susun.